

PM Malaysia Mengitari Area Monas Sebelum Bertemu Presiden Jokowi

JAKARTA (IM) - Rombongan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin terlebih dahulu mengitari area Monas sebelum ke Istana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (5/2). Sehingga, rombongan PM Muhyidin ke Istana Merdeka tidak melalui jalan Medan Merdeka.

Dari Monas rombongan disambut pasukan berkedua menuju Istana Merdeka. Saat memasuki halaman Istana Merdeka, PM Malaysia disambut tari dan alunan musik tradisional Indonesia. Termasuk pasukan-pasukan yang mengenakan pakaian adat.

Presiden Jokowi pun menyambut langsung PM Muhyiddin di depan pintu mobilnya. Keduanya nampak memakai masker dan tak bersalaman karena masih dalam kondisi pandemi covid-19. Nampak PM Muhyiddin dan Presiden Jokowi tidak didampingi oleh masing-masing Ibu Negara.

Kemudian keduanya beribincang sambil menuju lokasi upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di halaman Istana Negara. Upa-

cara penyambutan dilakukan dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Prosesi ini dilanjutkan dengan inspeksi pasukan oleh dua pemimpin negara. Setelah itu keduanya saling memperkenalkan delegasi yang ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Sesuai upacara kenegaraan, Presiden kemudian mengajak PM Muhyiddin masuk ke dalam Istana Merdeka untuk melakukan foto bersama dan mendandatangani buku tamu kenegaraan. Selanjutnya dilanjutkan pertemuan empat mata di veranda Istana Merdeka.

Ini merupakan kunjungan luar negeri pertama bagi PM Muhyiddin sejak dilantik Maret 2020. Dimana Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Jokowi dalam penyambutan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ● han

KPK Eksekusi Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Eksekusi dilakukan pada Rabu (3/2) setelah ada putusan peninjauan kembali (PK) atas perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Dengan demikian kasus Anas Urbaningrum telah berkekuatan hukum tetap.

"Tim Jaksa Eksekusi KPK Rabu 3/2/2021 telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Anas akan menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 bulan.

Selain Anas diwajibkan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp57.592.330.580,00 dan USD5.261.070. Tidak hanya itu, Anas juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Anas selesai menjalani pidana pokok.

Politisi PAN

Selain Anas, Jaksa KPK juga mengeksekusi mantan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Sukiman ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, Rabu kemarin. Eksekusi ini dilakukan setelah perkara yang menjerat Sukiman yakni suap penguru-

6 Bulan Jadi Buronan Polisi, Anggota DPRD Makan Gaji Buta

PADANG (IM) - Oknum anggota DPRD Dharmasraya asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), B (34), yang sudah enam bulan polisi terancam di pergantian antar waktu (PAW). Saat ini, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sumbang sedang memproses kasus tersebut.

"Kita sudah dapat surat dari DPRD Dharmasraya. Kalau memang harus di-PAW, ya di-PAW," kata Ketua DPW PKB Sumbang Anggia Ermanini, Jumat (5/2).

Anggia mengakui belum bisa berkomunikasi dengan B (34), tetapi pihaknya tetap mengedepankan asa praduga tidak bersalah.

"Pasti harus dikedepankan asa praduga tidak bersalah. Kita koordinasi dengan polisi," jelas Anggia yang merupakan anggota DPR RI ini.

B sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buronan polisi sejak

san dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, telah berkekuatan hukum tetap.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/2) mengatakan,

Sukiman dinyatakan terbukti bersalah menerima suap Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu dari mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, serta dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu.

Sukiman divonis 6 tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan, Sukiman juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu selambat-lambatnya sebulan setelah putusan Pengadilan memperolehi kekuatan hukum tetap.

Pada hari yang sama, Jaksa Eksekutor KPK juga mengeksekusi mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro ke Lapas Sukamiskin. Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di PJT II tahun 2017.

Djoko pun bakal menjalani hukuman 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan lantaran

"Terpidana akan menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan kewajiban membayar denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ungkap Ali. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KAIN TENUN ENDEK BALI

Kain Tenun Endek sering dijumpai di Bali dalam bentuk krama dan selendang. Memiliki ciri motif ragam hias ikat yang pinggir kain, sedangkan pada bagian tengah kain berwana. Dibuat menggunakan teknik single ikat pada benang pakan dan dua benang yaitu lusi dan pakan.

TERKAIT PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Menjamin Tak Ada Penarikan Sertifikat dari Masyarakat

Sofyan Djalil menjelaskan bahwa produk elektronik, termasuk sertifikat tanah, justru paling aman. Namun masyarakat masih banyak salah artikan soal kebijakan sertifikat elektronik.

JAKARTA (IM) - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjamin tidak ada penarikan sertifikat tanah terkait penerbitan sertifikat elektronik.

Pernyataan ini disampaikan apada acara Webinar "Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja" yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Kamis (4/2).

Sofyan Djalil mengakui masih banyak kesalahpahaman dari masyarakat terkait kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, khususnya e-sertifikat (sertifikat elektronik).

"Sertifikat elektronik banyak salah paham, salah kutip. Ini tentu sangat merugikan masyarakat," ujar Sofyan Djalil.

Sofyan Djalil menjelaskan bahwa produk elektronik,

termasuk sertifikat tanah, justru paling aman. Dia memberi contoh, dulu bank memiliki buku khusus atau buku tabungan, tetapi saat ini sudah mulai tidak ada lagi.

Begitu juga dalam pasar saham tak ada lagi lembar saham yang harus diteken, tetapi sudah berubah menjadi sertifikat saham digital. "Kalau ada berita di masyarakat soal penarikan sertifikat tanah, itu salah kutip atau dikutip di luar konteks," katanya.

Sofyan Djalil menegaskan bahwa BPN tidak akan pernah menarik sertifikat tanah dari masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat akan kemungkinan adanya oknum-oknum tertentu yang mengaku petugas ATR/BPN dan menarik sertifikat tanah.

Bank Tanah

Sementara itu, Sekjen



Sofyan Djalil

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto, menyoroati soal meningkatnya harga tanah setiap tahun membuat realisasi Proyek Strategis Nasional alami keterlambatan.

Apalagi saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, di berbagai daerah, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, bandara baru masih terus berlangsung di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menggenjot pembangunan sejuta unit rumah, yang tujuannya memudahkan masyarakat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.

Semua hal ini membutuhkan ketersediaan tanah yang besar, akan tetapi tanah yang dimiliki oleh pemerintah terbatas. Kedua kondisi tersebut menjadi penghambat percepatan pembangunan infrastruktur atau Proyek Strategis Nasional.

PENYERAHAN SERTIFIKAT KEKAYAAN INTELEKTUAL

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kedua kiri) didampingi Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris (kiri) dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk (kanan) menyerahkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Kain Tenun Endek Bali yang diterima oleh Gubernur Bali Wayan Koster (kedua kanan) saat kegiatan penyerahan sertifikat di Denpasar, Bali, Jumat (5/2). Dalam kegiatan tersebut Menkumham Yasonna Laoly menyerahkan 19 Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, satu Sertifikat Paten, empat Surat Pencatatan Hak Cipta dan 63 Sertifikat Merek untuk wilayah Bali.

FOTO/BER

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Menjamin Tak Ada Penarikan Sertifikat dari Masyarakat



Sofyan Djalil

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto, menyoroati soal meningkatnya harga tanah setiap tahun membuat realisasi Proyek Strategis Nasional alami keterlambatan.

Apalagi saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, di berbagai daerah, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, bandara baru masih terus berlangsung di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menggenjot pembangunan sejuta unit rumah, yang tujuannya memudahkan masyarakat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.

KPU Usul Pilkada Serentak Digelar 2026

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan serentak tahun 2026. Hal ini menyusul adanya rencana revisi terhadap UU tentang pemilihan umum (Pemilu) dan UU tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Dalam rangka penataan desain keserentakan pemilu, berikut ini usulan dan argumen saya perihal 2 Jenis Pemilu Serentak. Satu, Pemilu Serentak Nasional 2024 (Pilpres, Pemilu DPR dan DPD) dan Pemilu Serentak Daerah 2026 (Pilkada Prov/Kab/Kota dan DPRD Prov/Kab/Kota)," kata Hasyim dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Hasyim memaparkan sejumlah argumentasi atas usulan tersebut. Pertama, tujuan diadakannya Pemilu dalam membentuk pemerintahan (relasi eksekutif dan legislatif). Karena itu, pemilu diselenggarakan serentak antara pemilu untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif.

Kedua, Pemilu Serentak Nasional sudah ada desain atau pola keserentakan 5 tahunan, dan sudah dipraktikkan dalam Pemilu 2019. Regularitasnya 5 tahun berikutnya adalah 2024.

"Pilkada Serentak selama ini (2015, 2017, 2018, 2020) baru tercapai keserentakan coblosan, belum mampu menerangkan masa jabatan kepala daerah, dan belum mampu melembagakan keserentakan tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan daerah serentak (pilkada dan pilgub prov/kab/kota)," ujarnya.

Dia menjelaskan, selama

husus yang dibentuk oleh pemerintah yang mengelola tanah. Bank Tanah ini berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah," ujar Himawan.

"Pada UUCK, Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pengamanan pemertanan bank tanah, untuk menjalankan fungsi eksekutor tersebut. "Bank Tanah adalah badan

Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan agar dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dengan berka pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Namun untuk Pilkada Serentak, PKB tetap ingin didasarkan pada UU Nomor 10/2016 tentang DPRD.

"Evaluasi Pemilu 2019, ditemukan kekurangan-kekurangan yang terkait regulasi. Contoh, lemah dan tidak efektifnya penegakan hukum atas praktek money politik dan pasal yang mengatur penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara) tidak disesuaikan dengan beratnya beban pekerjaan. Akibatnya, ratasan penyelenggara meninggal dunia," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim saat dihubungi, Jumat (5/2).

Oleh karena itu, sambung Luqman, Fraksi PKB berpandangan bahwa revisi UU Pemilu mutlak untuk dilakukan guna memperbaiki pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) di masa mendatang.

"Menurut PKB, Revisi UU Pemilu mutlak diperlukan, agar Pemilu 2024 praktek money politic dapat ditekan dan korban jiwa penyelenggara dapat dihindarkan," ujarnya. ● han



DALAM RANGKA HPN 2021

IIPG Serahan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Lewat PWI Peduli

JAKARTA (IM) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Peduli menerima bantuan 1.000 paket kebutuhan sembako dari Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), Jumat (5/2). Selanjutnya bantuan tersebut an di bagi-bagikan kepada masyarakat.

Penyerahan bantuan sembako dari IIPG ini dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum IIPG, Yanti Airlangga Hartarto kepada perwakilan PWI daerah sekitar Jakarta yang hadir.

Ketua Umum PWI Pusat yang juga penanggung jawab HPN 2021, Atal S. Depari menyambut baik semangat solidaritas IIPG dalam membantu warga pers di masa pandemi ini.

"Pertemuan ini jadi menarik karena Ibu (Yanti Airlangga) membawa bekal luar biasa ini, ada 1.000 paket sembako, sampai kami kevalahan, mau dikirim ke mana sembako ini. Ternyata teman-teman tidak kewalahan, langsung dibuat floating diberikan kepada masyarakat pers yang membutuhkan ini dalam masa pandemi," ujar Atal dalam sambutannya di Sekretariat PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

Atal mengatakan, seluruh bantuan ini segera didistribusikan dari KONI Pusat. Yanti Airlangga pun setuju dalam suasana pandemi ini, harus saling bergotong royong dan meringankan beban sesama. Kata dia, seperti biasanya Jumat Berbagi, namun kali ini IIPG sebagai partisipasi dalam rangka HPN 2021.

Bantuan diserahkan kepada pers dan wartawan dalam rangka Hari Pers Nasional 2021 adalah yang kedua kalinya.

Beberapa pekan lalu, IIPG juga sudah memberikan bantuan ratusan paket sembako ke pers dan awak media, yang berdampak pandemi.

Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga hadir bersama Ketua Bansos IIPG, Nita Aziz Syamsuddin dan jajarannya. Sedangkan dari PWI Pusat hadir Ketua PWI Peduli, M. Nasir dan Sekjen PWI Pusat, Mirza Zuhadi.

Bantuan diserahkan kepada Yanti Mirza mewakili IKWI Pusat, Sekretaris PWI Bogor, Nurofik, Sekretaris PWI Depok Wandi dan satpam Dewan Pers, Panca dan Dar Edi Yoga mewakili PWI Pusat. ● ber



Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan kepada perwakilan PWI daerah Jakarta dan sekitarnya.

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan") telah melakukan peningkatan modal disor sebesar 13.000.000 (tiga belas juta) lembar saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh PHARMAC BIOLOGICAL HOLDING (S) PTE.LTD. dan PHARMECH BIOLOGICAL HOLDING (S) PTE.LTD.

Penyetoran atas peningkatan modal tersebut dilakukan dengan cara Mengkonversi hutang Perseroan kepada PHARMAC BIOLOGICAL HOLDING (S) PTE.LTD. dan PHARMECH BIOLOGICAL HOLDING (S) PTE.LTD. tersebut di atas.

Demikian pemberitahuan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikomposasikan Sebagai Setoran Saham.

Bogor, 6 Februari 2021

PHARMAC BIOLOGICAL HOLDING (S) PTE.LTD. PHARMECH BIOLOGICAL HOLDING (S) PTE.LTD.
Direksi
PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO